

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Etika Aparatur Sipil Negara Sebagai Variabel Moderating

Wahyu Marthen Erlindo Manuain*, Norman Duma Sitinjak, Parawiyati

Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Email: wahyumanuain@gmail.com*, noma1274@yahoo.com, parawiyati@unmer.ac.id

Keywords:

Accounting Information Systems, Internal Control, Accountability, Regional Financial Management, Ethics

Kata Kunci:

Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Etika

Abstract

Regional autonomy is a policy that gives authority to the government at the regional level to regulate and manage its own government affairs and community interests. As a form of accountability to the central government, accountability in regional financial management is an important thing to implement in regional governments. The research aims to analyze the influence of accounting information systems and internal controls on the accountability of regional financial management with State Civil Apparatus ethics as a moderating variable. The type of research used is quantitative. The type of in this study is primary data. The method used in data collection is a questionnaire. The scale used to process the questionnaire in this study is the Likert scale. The study population is employees in the departments within the Alor Regency Government. The number of samples in the study was 69 employees and the sampling technique used was purposive sampling. The data analysis techniques in this study used multiple linear regression and moderated regression. The results showed that the accounting information system has a positive effect on the accountability of regional financial management in local governments in Alor Regency. Internal control has a positive effect on the accountability of regional financial management in local governments in Alor Regency. The accounting information system's influence on the accountability of regional financial management is moderated by State Civil Apparatus ethics.

Abstrak

Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan yang memberi kewenangan bagi pemerintah di tingkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk diterapkan di pemerintah daerah. Penelitian bertujuan dalam menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan etika ASN sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Skala yang digunakan untuk mengolah kuesioner dalam penelitian ini adalah skala Likert. Populasi penelitian adalah pegawai di dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Jumlah sampel penelitian sebanyak 69 pegawai dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kabupaten Alor. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kabupaten Alor. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimoderasi etika ASN.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menjalankan praktik pemerintahan sering dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah diberi ruang untuk mengambil keputusan dan mengelola urusannya sendiri, mulai dari pelayanan publik hingga pengelolaan potensi daerah. Kewenangan ini tidak hanya memberikan kebebasan bertindak, tetapi juga menuntut tanggung jawab agar setiap kebijakan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mekanisme pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri demi kepentingan masyarakat di wilayahnya. Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan yang memberi kewenangan bagi pemerintah di tingkat daerah untuk melakukan pengelolaan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sudah tepat apabila diterapkan di negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada luasnya wilayah Indonesia sehingga tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pembangunan di setiap daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Mardiasmo, 2009) (Surjono & Firdaus, 2017). Menurut (Safutra et al., 2019) (Karina et al., 2023). (2019), dengan adanya akuntabilitas, pihak-pihak yang berkepentingan mempercayakan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi acuan mengambil keputusan. (Kewo, 2017) menyatakan bahwa dinamika dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah meningkatnya dorongan agar lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Masyarakat kini semakin menuntut kejelasan mengenai bagaimana dana publik digunakan, sehingga akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting mengingat masih terjadi kasus penyalahgunaan anggaran keuangan daerah berupa korupsi oleh aparatur sipil negara (Ibietan, 2013). Kasus yang terjadi di antaranya dilakukan oleh EW, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Nawawi et al., 2019) di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pelaksana anggaran 2022, yang menjadi tersangka kasus korupsi renovasi 14 sekolah di Kabupaten Alor (detik, 2024). Selain itu, juga terdapat nama JEM yang menjadi tersangka kasus pengadaan mobil Bumdes tahun anggaran 2021 senilai Rp5,7 miliar, di mana JEM merupakan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor (Tribunnews, 2023). Kedua kasus ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sistem informasi akuntansi yang kurang andal, pengendalian internal yang lemah, serta rendahnya etika ASN dalam menjalankan tugasnya (Magboul et al., 2024).

Agar akuntabilitas keuangan daerah dapat terwujud, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang andal, transparan, adil, efektif, maupun efisien. Sistem akuntansi tersebut berperan sebagai instrumen pendukung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan dinilai tepat untuk diterapkan pada pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh (Molle et al., 2023) bahwa sistem informasi akuntansi untuk mengelola keuangan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Setiap transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dicatat dengan

rapi agar dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, kemudian dikelompokkan, diolah, dan ditafsirkan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah, dan seluruh informasi yang telah dirangkum selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Rangkaian mekanisme mulai dari pencatatan hingga penyajian laporan keuangan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses dari sistem informasi keuangan daerah (Herlina et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Molle et al. (2023) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Purba & Amrul (2018) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut (Fitrios, 2016), sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut (Ismail, 2018).

Beberapa penelitian telah mengkaji variabel serupa dengan hasil yang bervariasi. Penelitian Molle et al. (2023) dan (Antika et al., 2020) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, Purba & Amrul (2018) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak memberikan dampak pada akuntabilitas. Penelitian Kewo (2017), (Utami & Ganika, 2021)), dan Antika et al. (2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian (Marshanda et al., 2024) dan (Bekti, 2021) menekankan pentingnya etika ASN dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, namun belum banyak penelitian yang menguji peran etika ASN sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji peran moderasi etika ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Selain sistem informasi akuntansi, pengendalian internal juga berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian intern, maka tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat (Kewo, 2017). Tujuan aktivitas pengendalian internal meliputi pencegahan penipuan, penyediaan laporan yang dapat diandalkan dan pengamanan aset pemerintah daerah (Abubakar et al., 2017). Aktivitas pengendalian internal jika ditetapkan secara memadai dan bekerja secara efektif sesuai rencana merupakan mekanisme akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah. Kasus korupsi di Alor menunjukkan bahwa pengendalian internal belum berjalan efektif, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian di setiap dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Selain sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal, etika aparatur sipil negara juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Santoso & Dewi, 2019). Etika ASN mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik (Dinata et al., 2023) profesi (Bekti, 2021). Perilaku etis ASN diyakini dapat memperkuat efektivitas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dalam mewujudkan akuntabilitas (Marshanda et al., 2024). Namun, penelitian tentang peran etika ASN sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih terbatas, khususnya di Kabupaten Alor, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut (Yusuf & Daris, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Secara ideal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus diwujudkan melalui sistem informasi akuntansi yang andal dan transparan, pengendalian internal yang

memadai, serta didukung oleh etika ASN yang tinggi. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terjadi kasus korupsi yang melibatkan ASN di Kabupaten Alor yang mengindikasikan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Zakaria et al., 2023). Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi temuan mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas (Molle et al., 2023; Purba & Amrul, 2018), sementara penelitian tentang peran etika ASN sebagai variabel moderasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan etika ASN sebagai variabel moderasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menjadikan etika ASN sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel moderasi ini masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, khususnya di Kabupaten Alor, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori dan praktik akuntabilitas sektor publik. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi hasil mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan menghadirkan etika ASN sebagai variabel yang mempengaruhi kuat lemahnya hubungan tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimoderasi etika ASN, serta bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimoderasi etika ASN.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menganalisis pengaruh sistem informasi (Suryanto, 2019) akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimoderasi etika ASN, serta menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimoderasi etika ASN. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, pertama secara teoretis temuan dari penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya pengembangan ilmu akuntansi (Sekaran & Bougie, 2016), khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji isu atau tema yang serupa, sekaligus memberikan gambaran awal dalam mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam di masa mendatang. Kedua, secara praktis temuan dari penelitian ini berkontribusi dalam memberikan masukan pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Alor terkait pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi etika ASN, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan terkait pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, temuan dari penelitian ini juga berkontribusi bagi pihak terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Alor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen (sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal) terhadap variabel dependen (akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah) dengan etika ASN sebagai variabel moderasi. Penelitian dilaksanakan pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ruang lingkup variabel meliputi sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan etika ASN. Populasi penelitian adalah pegawai di 23 dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, dengan sampel sebanyak 69 pegawai yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria ASN dan pengguna sistem akuntansi keuangan daerah. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin (Sangat Setuju=5 hingga Sangat Tidak Setuju=1), serta didukung studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari buku, jurnal, dan referensi akademik terkait (Priyatno, 2017).

Instrumen penelitian terdiri dari empat bagian: pengantar dan identitas peneliti, data diri responden (jenis kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja), serta pernyataan variabel penelitian yang mencakup sistem informasi akuntansi dengan indikator pencatatan, penggolongan, dan pelaporan; pengendalian internal dengan indikator monitoring, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan lingkungan pengendalian; etika ASN dengan indikator moralitas dan ketaatan terhadap peraturan; serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif (Sutopo & Slamet, 2018), uji validitas dan reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0,6), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta analisis inferensial berupa regresi linear berganda dan regresi moderasi (MRA) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen serta peran moderasi etika ASN, dengan tingkat signifikansi 5%.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh simultan, dan Adjusted R Square untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak statistik dengan kriteria pengujian: signifikansi < 0,05 menunjukkan pengaruh signifikan, nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 menunjukkan bebas multikolinearitas, serta residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov > 0,05. Kombinasi seluruh teknik analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan etika ASN sebagai variabel moderasi di Kabupaten Alor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	52	75,4%
Perempuan	17	24,6%
Total	69	100,0%
Usia:		
20 - 29 tahun	7	10,1%
30 - 39 tahun	27	39,1%

40 - 49 tahun	26	37,7%
≥ 50 tahun	9	13,1%
Total	69	100,0%
Pendidikan terakhir:		
S1	69	100,0%
Total	69	100,0%
Lama bekerja:		
1 - 5 tahun	1	1,5%
6 - 10 tahun	6	8,7%
11 - 15 tahun	45	65,2%
> 15 tahun	17	24,6%
Total	69	100,0%

Sumber: data kuesioner, diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 52 orang (75,4%) dibandingkan perempuan 17 orang (24,6%), yang mengindikasikan pria lebih banyak diberi otorisasi sebagai pengguna sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan usia, pegawai berusia 30-39 tahun mendominasi dengan 27 orang (39,1%), diikuti usia 40-49 tahun sebanyak 26 orang (37,7%), usia >50 tahun sebanyak 9 orang (13,1%), dan usia 20-29 tahun sebanyak 7 orang (10,1%), menunjukkan bahwa pengguna sistem didominasi oleh pegawai usia dewasa dengan kematangan berpikir dan pengalaman kerja. Seluruh responden berpendidikan terakhir S1, sementara berdasarkan lama bekerja, mayoritas pegawai memiliki masa kerja 11-15 tahun sebanyak 45 orang (65,2%), diikuti >15 tahun sebanyak 17 orang (24,6%), 6-10 tahun sebanyak 6 orang (8,7%), dan 1-5 tahun sebanyak 1 orang (1,5%), yang berarti pengguna sistem akuntansi keuangan daerah telah memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga tingkat kesalahan dalam bekerja semakin berkurang.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem informasi akuntansi	0,905	Reliabel
Pengendalian internal	0,844	Reliabel
Etika ASN	0,778	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	0,819	Reliabel

Sumber: data kuesioner, diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, etika ASN, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6. Nilai tersebut menandakan bahwa rangkaian pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinilai andal, karena mampu menghasilkan jawaban yang relatif stabil atau tidak berubah-ubah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Tabel 3 berikut menunjukkan hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	69

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28918603
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.076
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 0,059. Karena nilai tersebut lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka data dalam penelitian ini memiliki arti berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

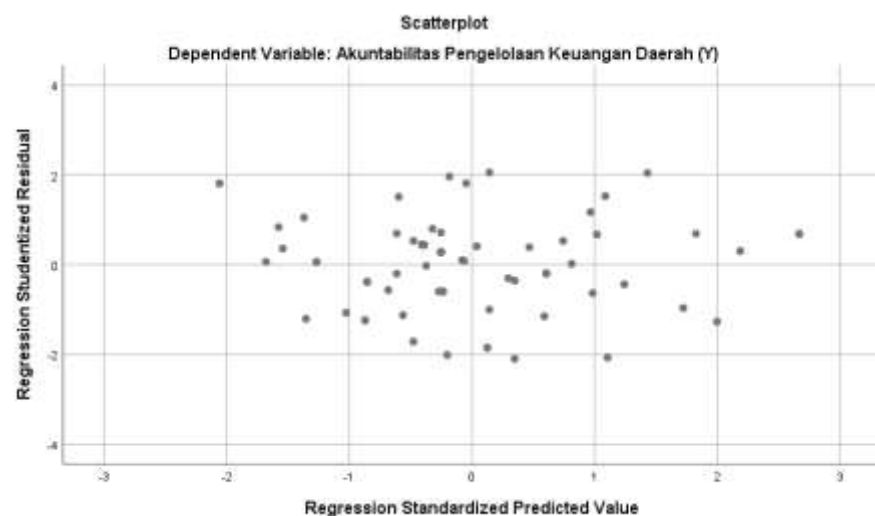
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sistem informasi akuntansi	0,717	1,395
Pengendalian internal	0,705	1,419
Etika ASN	0,823	1,214

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan etika ASN memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 serta nilai VIF di bawah 10. Angka-angka tersebut menandakan bahwa tidak terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen dalam model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas, sehingga masing-masing variabel masih dapat menjelaskan pengaruhnya secara jelas terhadap variabel yang diteliti.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini didasarkan pada grafik *scatter plot* yang hasilnya sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik Scatter Plot

Dilihat dari hasil analisis pada grafik *scatter plot*, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak tanpa membentuk pola yang jelas, baik berada di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Dengan demikian, bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

- 1) Analisis Regresi Linear Berganda
 - a) Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,643	0,413	0,395	2,607

Sumber: data kuesioner, diolah

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,395 menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal mampu menjelaskan sekitar 39,5% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, kedua faktor tersebut memiliki kontribusi yang cukup berarti, namun belum sepenuhnya menentukan tingkat akuntabilitas. Sementara itu, sekitar 60,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

- b) Uji F

**Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model	Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	315,517	2	157,759	23,219	.000 b
	Residual	448,425	66	6,794		
	Total	763,942	68			

a. *Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)*

b. *Predictors: (Constant), Pengendalian Internal (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X1)*

Nilai signifikansi yang diperoleh dari uji F tercatat sebesar 0,000, yang berarti di bawah batas toleransi kesalahan sebesar 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- c) Analisis Persamaan Regresi Linear berganda

**Tabel 7. Nilai Koefisien Regresi
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	8,741	3,655	
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	,356	,080	,487
Pengendalian Internal (X2)	,289	,131	,241

Sumber: data kuesioner, diolah

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh persamaan regresi linear berganda $Y = 8,741 + 0,356X_1 + 0,289X_2 + e$, yang menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 8,741 berarti ketika sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal diasumsikan tetap, maka

tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperkirakan sebesar 8,741. Koefisien regresi sistem informasi akuntansi bernilai positif 0,356, yang berarti setiap kenaikan penerapan sistem informasi akuntansi akan diikuti peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,356 dengan asumsi pengendalian internal tetap. Demikian pula, koefisien regresi pengendalian internal bernilai positif 0,289, yang berarti setiap kenaikan penerapan pengendalian internal akan diikuti peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,289 dengan asumsi sistem informasi akuntansi tetap.

d) Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.391	.020
	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	4.473	.000
	Pengendalian Internal (X2)	2.208	.031

Sumber: data kuesioner, diolah

Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi untuk variabel sistem informasi akuntansi tercatat sebesar 0,000 yang berada di bawah batas 0,05, sehingga sistem informasi akuntansi terbukti memiliki pengaruh yang bermakna terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian hipotesis H1 dinyatakan diterima. Sementara itu, nilai signifikansi untuk variabel pengendalian internal tercatat sebesar 0,031 yang juga berada di bawah batas 0,05, sehingga pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh yang bermakna terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian hipotesis H2 dinyatakan diterima.

2) Analisis Regresi Moderasi

a) Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,758	0,575	0,541	2,270

Sumber: data kuesioner, diolah

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9, nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,541. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) secara simultan mampu menjelaskan sebesar 54,1% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sebesar 45,9% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disebabkan faktor-faktor di luar variabel yang diteliti.

b) Uji F

**Tabel 10. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model	Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	439,225	5	87,845	17,043	.000 ^b
	Residual	324,717	63	5,154		
	Total	763,942	68			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), X2*Z, Sistem Informasi Akuntansi (X1), Pengendalian Internal (X2), Etika PNS (Z), X1*Z

Hasil uji F menemukan bahwa signifikansi yang didapatkan adalah 0,000 di bawah batas 0,05. Angka ini memperlihatkan bahwa secara bersama-sama sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dinilai memadai dan relevan dalam menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini.

c) Uji t

Tabel 11. Hasil Uji t Regresi Moderasi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.315	26.548		.313	.755
	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	-1.221	.632	-1.671	-1.931	.058
	Pengendalian Internal (X2)	2.060	1.022	1.714	2.016	.048
	Etika PNS (Z)	.208	.722	.237	.288	.774
	X1*Z	.042	.017	3.383	2.422	.018
	X2*Z	-.053	.028	-2.865	-1.872	.066

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Berdasarkan Tabel 11, interaksi antara sistem informasi akuntansi dengan etika ASN menunjukkan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif 0,042, sehingga H3 diterima yang berarti etika ASN memperkuat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana semakin baik etika ASN maka semakin kuat pengaruh sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas. Sementara itu, interaksi antara pengendalian internal dengan etika ASN menunjukkan nilai signifikansi $0,066 > 0,05$, sehingga H4 tidak diterima yang berarti etika ASN tidak terbukti memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Temuan yang didapatkan merujuk pada tabel 4.17 yaitu variabel sistem informasi akuntansi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari batas 0,05, maka hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Artinya, sistem informasi akuntansi terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada dinas-dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Arah hubungan yang ditunjukkan bersifat positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,356. Angka ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi di setiap dinas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, maka semakin meningkat pula kualitas pertanggungjawaban

pengelolaan keuangannya. Dengan kata lain, kemampuan sistem informasi akuntansi dalam pencatatan, pengolahan (Purnomo, 2019), serta pelaporan transaksi keuangan secara tertib dan akurat akan mendukung pemerintah daerah untuk menyajikan laporan yang lebih transparan dan dapat dipercaya (Jatmiko et al., 2019).

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Alor berupaya menyajikan laporan penggunaan anggaran daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap dana yang digunakan diharapkan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan agar proses pencatatan dan pelaporan memiliki pedoman yang jelas serta dapat diterima secara umum.

Selain itu, setiap laporan pertanggungjawaban perlu dilengkapi dengan bukti administrasi yang memadai agar setiap transaksi dapat ditelusuri kebenarannya. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang mampu menyajikan data keuangan secara lengkap, akurat, dan transparan. Di lingkungan dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Alor, sistem ini berperan dalam memperbaiki mekanisme pencatatan dan penyusunan laporan, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang berjalan dengan baik memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Molle et al. (2023) dan Antika et al. (2020) yang juga menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sistem informasi akuntansi dan tingkat akuntabilitas. Dengan sistem yang efektif, proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara andal dan tepat waktu. Pada akhirnya, kondisi tersebut mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, sesuai regulasi, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berlandaskan Tabel 4.17 diperoleh temuan uji hipotesis bahwa nilai signifikansi variabel pengendalian internal adalah 0,031. Dikarenakan angka signifikansi lebih kecil dari batas 0,05, maka hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, hubungan yang ditemukan juga bersifat positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,289. Angka ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal di dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Alor, maka semakin meningkat pula kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengendalian internal mencakup berbagai mekanisme seperti prosedur pengawasan, analisis risiko, evaluasi, serta pencatatan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Ketika seluruh prosedur tersebut dijalankan secara konsisten, risiko kesalahan maupun penyimpangan dapat ditekan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian internal bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Hasil penelitian ini memperlihatkan konsistensi dengan sejumlah studi sebelumnya oleh Utami & Ganika (2021) serta Antika et al (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, pengendalian internal bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi menjadi unsur utama yang menentukan kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang dirancang dan dijalankan secara efektif membantu pemerintah daerah memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan benar dan dapat dipercaya. Selain itu, sistem ini juga mendorong kepatuhan terhadap peraturan

yang berlaku, menjaga keamanan aset daerah, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan anggaran. Ketika seluruh mekanisme pengendalian berjalan secara konsisten, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib dan transparan. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat karena penggunaan anggaran dapat dipantau, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dimoderasi Etika ASN

Berlandaskan pada Tabel 4.20 diperoleh temuan interaksi antara sistem informasi akuntansi dan etika ASN ($X1*Z$) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018. Dikarenakan angka tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Hal ini berarti etika ASN memiliki peran sebagai variabel moderasi pada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Koefisien regresi interaksi yang bernilai positif sebesar 0,042 menunjukkan bahwa etika ASN berperan memperkuat hubungan tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugasnya, maka manfaat dari penerapan sistem informasi akuntansi akan semakin terasa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam praktik di dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Alor, sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan pencatatan dan pelaporan yang tertib. Namun, sistem tersebut akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila didukung oleh perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai etika. Kombinasi antara sistem yang andal dan sumber daya manusia (Budi et al., 2020) yang berintegritas inilah yang pada akhirnya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan kata lain akuntabilitas semakin kuat apabila didukung oleh ASN yang menjunjung tinggi etika ASN. Hal ini dapat disebabkan pegawai yang menjunjung tinggi etika ASN akan berperilaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan. Hasil penelitian ini didukung pendapat Marshanda (2024) bahwa etika ASN berperan penting dalam penerapan akuntabilitas sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dimoderasi Etika ASN

Berlandaskan Tabel 4.20 diperoleh temuan untuk regresi moderasi yaitu interaksi antara variabel pengendalian internal dan etika ASN ($X2*Z$) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,066. Dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis keempat (H4) dinyatakan tidak diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa etika ASN tidak berfungsi sebagai variabel yang memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa meski etika aparatur tetap penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, namun dalam model penelitian ini etika ASN tidak terbukti memengaruhi seberapa besar dampak pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan. Pengendalian internal tetap memiliki peran langsung dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah, terlepas dari tinggi atau rendahnya tingkat etika ASN sebagai variabel moderasi dalam analisis ini. Dalam konteks dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Alor, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian internal seperti prosedur pengawasan, analisis risiko, dan evaluasi memiliki pengaruh tersendiri terhadap akuntabilitas. Keberhasilan pengendalian internal dalam mendukung transparansi dan ketertiban pengelolaan keuangan tidak secara signifikan berubah karena faktor etika ASN dalam model yang diuji. Namun demikian, secara praktik, etika tetap menjadi landasan moral yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dibahas pada bab sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kabupaten Alor, yang berarti semakin efektif dan berkualitas penerapan sistem informasi akuntansi maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena sistem yang andal mampu mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara tepat sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas karena pengendalian internal yang memadai mampu memastikan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan.

Selanjutnya, etika ASN terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana penerapan sistem informasi akuntansi yang didukung oleh perilaku etis ASN akan meningkatkan kualitas pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara lebih transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, etika ASN tidak terbukti memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah tidak secara signifikan diperkuat oleh tingkat etika ASN, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan pengendalian internal itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. A., Dibal, N. A., Amade, P., & Joyce, P. (2017). Effect of Internal Control Activity on Financial Accountability and Transparency in Local Government Areas of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 9(30), 58–65. <http://www.iiste.org>
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Bekti, H. (2021). Ethics of The State Civil Apparatus in Providing Public Services in an Effort to Realize Good Governance. *Jurnal Ekonomi*, 10(1), 22–30. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Budi, M., A, M., Djalil, Yusmita, F., & Bz, F. S. (2020). The Influence of Human Resource Competency, Regional Finance Accounting System Implementation and Internal Control System on the Quality of Regional Financial Statement at Government Work Agencies (SKPK) of Bener Meriah Regency, Province of Aceh, Indonesia. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 609–616. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2020.v03i07.005>
- Dinata, I. R., Ngarawula, B., & Suharnoko, D. (2023). Implementation of the Civil Servant Code of Ethics in the Blitar City Regional Secretariat. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(5), 33–38. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.5.3>

- Fitrios, R. (2016). Factors That Influence Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5(4), 192–198. <http://www.ijstr.org>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Transparency, Competency, Financial Accounting System, The Accountability of Regional Financial Management, Implementation of The Government Internal Control System. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Ibietan, J. (2013). Corruption and Public Accountability in the Nigerian Public Sector: Interrogating the Omission. *European Journal of Business and Management*, 5(15), 41–49.
- Ismail, F. (2018). *Statistika: Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Prenada Media Grup.
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Puji Astuti, R., Nuhnita Sari, R., & Fil Ardhi, K. (2019). Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 102, 6–12. <https://doi.org/10.2991/icafe-19.2019.2>
- Karina, A., Nur, M., Molina, M., Digidowiseiso, K., & Ali, A. (2023). A Review of Internal Control and Accountability of Regional Financial Management Literature. *Global Journal of Business, Economics & Social Development*, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.56225/gjbesd.v1i2.13>
- Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 293–297. <http://www.econjournals.com>
- Magboul, I., Jebreel, M., Shawtri, F., Qabajeh, M., Shanti, A., Alqudah, M., & Huson, Y. (2024). Factors Influencing Accounting Information System Usage by Oil Companies & Performance Outcomes. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2369211>
- Marshanda, S., Zikri, S. N., Pardede, C., Narendra, D., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Peranan Etika Dalam Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 396–401. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Molle, S. S., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(3), 348–356.
- Nawawi, J., Tamar, M., & Indrayani. (2019). Kode Etik Aparatur Sipil Negara. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 5(1), 1–6. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Penerbit Andi.
- Purnomo, A. K. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*. Jakad Publishing.
- Safutra, W., Darwanis, & Syam, F. (2019). The Effect of Regional Financial Statement Presentation and Regional Financial Statement Accessibility on Regional Financial Management Accountability in the District of Bener Meriah, Province of Aceh, Indonesia. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 2(12), 798–804. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2019.v02i12.016>

- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 179–187. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons Ltd.
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1357–1368. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737>
- Suryanto, S. (2019). Analysis of Regional Financial Information Systems As A Media of Regional Financial Management Transparency in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/2/022080>
- Sutopo, E., & Slamet, A. (2018). *Statistik Inferensial*. Penerbit Andi.
- Utami, F., & Ganika, G. (2021). The Effect of Government Internal Control System on Regional Financial Accountability. *Economic Education Analysis Journal*, 10(2), 326–335. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v10i2.46629>
- Yusuf, M., & Daris, L. (2018). *Analisis Data Penelitian*. IPB Press.
- Zakaria, A. A., Fasa Siregar, A., & Hofiefah, H. H. (2023). Analisis Etika dan Moral: Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1093–1103. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms>